



PERLUAS JANGKAUAN JPD DAN SANTUNAN KEMATIAN

Terkendala Data, Dewan Rekomendasikan Kebijakan Lokal

YOGYA (KR) - Komisi D DPRD Kota Yogya merekomendasikan ada kebijakan lokal guna mendorong perluasan jangkauan penerima bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan Santunan Kematian (Sankem). Hal ini menyusul temuan banyaknya warga kurang mampu di lapangan yang justru tidak terakomodasi dalam dua program bantuan tersebut akibat kendala administratif data.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Darini, menjelaskan banyak warga miskin yang secara faktual membutuhkan bantuan justru tercatat pada desil 6 ke atas dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Padahal, aturan yang berlaku

saat ini membatasi JPD hanya untuk desil 1 hingga 5, serta Sankem untuk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) desil 1 hingga 2, sehingga kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif membuat mereka gagal memperoleh haknya," urainya, Selasa (11/8).

Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, pihaknya juga telah menggelar rapat gabungan bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bagian Hukum, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogya pada Senin (10/8) lalu. Hasil rapat tersebut menyepakati perlunya revisi payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) dan Petunjuk Teknis (Juknis) agar skema pelepasan desil dapat diwujudkan secara legal sebelum disosialisasikan secara luas.

Darini menyebut, guna meng-

antisipasi potensi ketidaktepatan sasaran, mekanisme pendaftaran bagi warga di desil 6 akan diperketat secara berlapis.

Calon penerima diwajibkan melampirkan surat pernyataan tidak mampu mandiri bermaterai, yang di dalamnya memuat klausul tegas berupa kewajiban mengembalikan dana bantuan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian kondisi ekonomi.

Terkait potensi penambahan beban anggaran bagi Pemkot Yogya akibat perluasan ini, Darini mengusulkan penerapan skema bantuan berjenjang yang tidak disamaratakan. "Sebagai contoh, jika ban-

tuhan Sankem penuh untuk desil 1 dan 2 dipatok sebesar Rp 4 juta, maka warga pada desil 3 hingga 6 dapat menerima nominal yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, seperti Rp 1 juta atau Rp 2 juta," jelasnya.

Darini menegaskan bahwa kebijakan ini berfokus pada kehadiran negara untuk memberikan perlindungan sosial yang merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sebab adil itu tidak harus sama besarnya, yang terpenting masyarakat merasakan hadirnya intervensi dan perlindungan dari Pemkot Yogya," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005